

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data pada bab v dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis rasio Efektivitas PAD, kabupaten TTU berada pada tingkat efektif dengan rasio antara 90%-100% dan kabupaten TTS berada pada kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio Efisiensi Keuangan Daerah, kabupaten TTU berada pada tingkat tidak efektif dengan rasio lebih dari 100% dan kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efektif dengan rasio 80%-90%.
3. Berdasarkan hasil analisis rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, kabupaten TTU dan kabupaten TTS mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan rasio yang dicapai diatas 50%.
4. Berdasarkan hasil analisi rasio kemandirian daerah, kabupaten TTU dan TTS berada pada pola hubungan Instruktif dimana peran pemerintah lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan tingkat kemampuan daerah yang rendah dengan rasio yang dicapai berkisar 0%-25%.
5. Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kabupaten TTU dan TTS masih sangat kurang untuk

melaksanakan desentralisasi fiskal karena pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerah dan semakin meningkat setiap tahun. Rasio yang dicapai masih dibawah 10%.

6. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan pendapatan pada kabupaten TTU semakin meningkat setiap tahun dengan pertumbuhan yang positif. Sedangkan pada kabupaten TTS pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan PAD kabupaten TTU selalu mengalami fluktuasi, dan pada kabupaten TTS tahun 2016, pendapatan asli daerahnya mengalami pertumbuhan yang negatif karena menurunnya realisasi Pendapatan asli daerah pada kabupaten tersebut.

7. Berdasarkan hasil analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah pada kabupaten TTU dan TTS, anggaran yang dialokasikan untuk belanja operasi cukup besar dengan rasio di atas 60%.

Sedangkan untuk rasio belanja modal pada kabupaten TTU dan TTS, pengalokasiannya lebih sedikit yaitu dibawah 20%. Seharusnya anggaran lebih banyak dialokasikan ke belanja modal karena belanja modal akan digunakan untuk kepentingan publik demi kesejahteraan masyarakat.

8. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja operasi, pada kabupaten TTU mengalami fluktuasi disebabkan karena naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan keuangan. Sedangkan pada kabupaten TTS juga mengalami fluktuasi kecuali pada tahun 2014.

Sedangkan pertumbuhan belanja modal pada kabupaten TTU pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -34,83% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena turunnya realisasi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan irigasi. Pada kabupaten TTS juga mengalami pertumbuhan yang negatif tahun 2014 sebesar -14,79% karena turunnya realisasi belanja tanah, gedung dan bangunan.

## **1.2 Saran**

Adapun saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan diharapkan terus meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada serta menggali sumber PAD yang baru terutama untuk penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan sumber keuangan yang penting dan utama bagi daerah agar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi daerah serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat.
2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan sosialisasi secara berkelanjutan akan pentingnya membayar pajak dan retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih rinci lagi menganalisis kinerja pemerintah daerah dengan perubahan waktu dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi. 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
- Anonimous. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Anonimous. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah*
- Anonimous. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Anonimous. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Anonimous. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Bisma, I Dewa Gede & Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal. GaneC Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3, Mataram.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berupa data *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013-2016*
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa data *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013-2016*
- Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 372 tahun 1996 tentang *Kriteria untuk Mengukur Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Imam & Mugroho, Tri Laksono.2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press
- KS, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mahsun, Moh, Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhibtari., Astriana Nabila. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemda Kota Magelang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pramita, Puput Risky. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Rahmantina, Aulia Zhufinsa Nur. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung*. Skripsi Institut Manajemen Telkom Bandung
- Sugiyono.2013.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Supriyanto.1985.*Defenisi Anggaran*.[Http://wonkcbr.blogspot.com/2010/12.html](http://wonkcbr.blogspot.com/2010/12.html)
- Suparmoko M.A.2002.*Ekonomi Publik untuk Keuangan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi